

JURNAL
MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DENGAN
PENDEKATAN Keadilan Restoratif



Diajukan Oleh :

ANGGUN SETIA ANAPRATU

NPM : 110510711

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DENGAN
PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF**



Diajukan Oleh :

ANGGUN SETIA ANAPRATU

NPM : 110510711

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Peradilan Pidana

Telah disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 9 November 2015

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

:

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



PX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

I. Judul Tugas Akhir : Model Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif.

II. Identitas

Nama Mahasiswa : Anggun Setia Anapratu

Nama Dosen Pembimbing : Dr. G. Widiartana, S.H.,M.Hum.

III. Nama Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

IV. Abstract

Model Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

The child is a desire of every family, the love that is given can make the children feel the attention and be extroverted to their family. A good environment also affect to the child development, because they are a good copier. The crime that committed by a child can make their mentality easily shaken, because they have not been think well of everything that they are doing. A child that convicted of a criminal act must be protected and checked by the criminal justice system of children. The paper aims to find whether the settlement of criminal cases the child is done with the restorative justice approach. In addition the model is suitable to be applied to the settlement of criminal cases of children with restorative justice approach. According to the scope of the study is on the disciplines of law, this is a part of a normative legal research. Sources of data is a secondary data that consists of primary legal, that is basic laws and secondary legal materials obtained from books, training and internet. By data analyzing of the primary legal materials in the form of basic laws and secondary legal materials. Based on the description and analysis can be concluded that the resolution of criminal cases the child is done with a restorative justice approach. Besides an appropriate model to be applied in the settlement of criminal cases children are models of family group conferencing.

Keywords: juvenile criminal cases, restorative justice approaches, child protection, child prosperity.

V. Pendahuluan

Latar Belakang : Anak merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada setiap keluarga, anak adalah sebuah titipan yang harus di jaga dan dirawat serta diberikan kehidupan yang layak. Peran keluarga dalam tumbuh kembang anak sangat di butuhkan, keluarga diharapkan dapat lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan seorang anak. Lingkungan yang baik juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak, karena dalam pertumbuhannya anak adalah seorang peniru yang baik. Seorang anak mudah mengikuti apa yang dilihat maupun didengarnya.

Akhir-akhir ini sering terjadi kejahatan yang pelakunya adalah seorang anak yang masih berada dibawah umur. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.¹ Penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh seorang anak tidak hanya dapat diselesaikan dengan penahanan kepada seorang anak. Menurut Undang-Undang No.11 Tahun 2012, penyelesaian perkara pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

¹ Maidin Gultom, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, refika aditama, Bandung, hlm, 2.

Pendekatan keadilan restoratif diharapkan dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah untuk dapat menemukan jalan keluar bersama secara adil. Pihak pelaku yang melakukan penjelasan mengenai apa yang terjadi dengan pelaku sangat mengharapkan pihak korban untuk dapat menerima dan memahami kondisi dan penyebab mengapa pihak pelaku melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian pada korban.² Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tersebut, maka penulis ingin membahas lebih mendalam terhadap topik penyelesaian perkara pidana anak ini dengan judul, **“MODEL PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF.”**

Rumusan Masalah :

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penyelesaian perkara pidana anak sudah dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif?
2. Model apakah yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif?

VI. Isi Masalah

A. Tinjauan Tentang Perkara Pidana Anak

1. Perkara Pidana Anak

Perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku utamanya sangatlah penting dan khusus dalam penanganannya. Selain itu anak adalah generasi

²Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diservasi dan Restorative Justice*, refika aditama, Bandung, hlm. 180.

penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.³

2. Proses Perkara Pidana Anak

a. Proses Diversi

Diversi merupakan suatu langkah atau proses perdamaian yang dilakukan oleh pihak pelaku dan pihak korban untuk mencari jalan keluar bersama dalam penyelesaian perkara dengan duduk bersama. Proses diversi dapat dilakukan oleh pihak penyidik sebagai langkah pertama dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

a. Penangkapan dan penahanan

Penangkapan dan penahanan terhadap anak dilakukan sebagai upaya terakhir dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, yaitu penangkapan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam dan anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.⁴ Selama proses penangkapan, anak harus tetap diberi perlakuan yang baik agar anak tidak merasa terancam.

b. Bantuan Hukum

³ Nasrani, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

⁴ Wagiati soetedjo dan melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*, refika aditama, Bandung, hlm . 170.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada setiap pemeriksaan sejak saat ditangkap atau ditahan, Anak berhak mendapatkan bantuan hukum. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan Orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan tersebut, maka penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.⁵

c. Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHP menjelaskan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang ada berdasarkan fakta yang terjadi di tempat kejadian.

d. Penuntutan

Penuntutan terhadap Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Apabila belum ada Penuntut Umum Anak, maka penuntut terhadap Anak dilakukan oleh Penuntut Umum bagi orang dewasa. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum Anak ;⁶

- 1) Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*, hlm. 174.

2) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
dan

3) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

e. Pemeriksaan Di Muka Sidang

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan Hakim yang dapat dijatuhkan terhadap Anak adalah berupa pidana atau tindakan. Pidana terdiri dari :⁷

(1) Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas :

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pemidanaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.

B. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

⁷*Ibid.*

Manfaat dari *Restorative Justice* itu sendiri adalah mengandung partisipasi penuh dan konsensus, berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan, memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh, mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal, dan memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.⁸

2. Model Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana

Keadilan restoratif mengenalkan beberapa metode penyelesaian tindak pidana, sebagai berikut :

a. *Victim Offender Mediation*

Tujuan dilaksanakan *victim offender mediation* adalah memberi penyelesaian terhadap peristiwa yang terjadi, di antaranya dengan membuat sanksi alternatif bagi pelaku atau untuk melakukan pembinaan di tempat khusus bagi pelanggaran yang benar-benar serius.⁹

b. *Family Group Conferencing*

Conferencing tidak hanya melibatkan korban utama (*primary victim*) dan pelaku utama (*primary offender*) tapi juga korban sekunder (*secondary victim*) seperti anggota keluarga dan teman korban.¹⁰

c. *Circles*

⁸Hade Brata, *Restorative Justice Sebagai alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/5506/2334> (diakses tanggal 8 Mei 2015).

⁹Marlina. *Op Cit*, hlm 184.

¹⁰*Ibid*.

Sasaran yang ingin dicapai melalui proses *Circles* adalah terlaksananya penyembuhan pada pihak yang terluka karena tindakan pelaku dan memberi kesempatan pada kepada pelaku untuk memperbaiki dirinya dengan tanggung jawab penyelesaian kesepakatan.¹¹

d. *Reparative Board/Youth Panel*

Tujuan menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator dan juga hakim, jaksa, dan pembela secara bersama merumuskan bentuk sanksi yang tepat bagi pelaku ganti rugi bagi korban atau masyarakat.¹²

e. *Victim Assistance Programs*

Kegiatan-kegiatan dalam Victim assistance program ini dirancang untuk memberikan berbagai pelayanan kepada korban sebagaimana seharusnya mereka peroleh dari proses peradilan. Tujuan dari pelayanan tersebut adalah :¹³

- 1) Untuk melindungi hak-hak korban;
- 2) Untuk mengurangi akibat dari kejahatan yang harus ditanggung oleh korban;
- 3) Untuk mengurangi dampak dari dilibatkannya korban dalam proses peradilan.

f. *Prisioner Assistance Programs*

¹¹*Ibid.*, hlm 193.

¹²*Ibid.*, hlm 195.

¹³ Widiartana, *Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, UAJY, Yogyakarta. Hlm. 32.

Berbeda dengan *Victim Assistance Programs*, kegiatan-kegiatan dalam *Prisoner Assistance Programs* diselenggarakan untuk memberikan pelayanan kepada pelaku. Pelayanan tersebut dapat dilakukan baik ketika pelaku masih berada dalam penjara ataupun ketika yang bersangkutan berada dalam masa pembebasan. Tujuan dengan diberikannya pelayanan pada pelaku ini adalah agar mereka dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.¹⁴

g. *Community Crime Prevention Programs*

Keadilan restoratif berkaitan dengan sanksi yang dapat dikenakan pada pelaku tindak hukum pidana. Dapat disimpulkan bahwa sanksi-sanksi dalam keadilan restoratif harus bersifat/bertujuan untuk :¹⁵

- a. Menyembuhkan/merehabilitasi penderitaa akibat dari adanya pelanggaran hukum, terutama pada korban, dari pada pemenjarahan terhadap pelaku.
- b. Merehabilitasi pelaku, serta dapat mengintegrasikan kembali pelaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain sanksi yang dikenakan kepada pelaku tidak bertujuan untuk membalas, melainkan agar pelaku dapat berubah menjadi manusia yang lebih baik dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi dikemudian hari.
- c. Menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.* Hlm. 30.

C. Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang Melibatkan Anak

Proses penyelesaian perkara pidana anak tidak semuanya dapat diselesaikan dengan proses restoratif, sebab pelaku yang dapat di proses diluar pengadilan hanya pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan yang ancaman pidananya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada Ibu Khatarina Ekorini Indriati, S.S, Kanit A (PPA) Subid M, Dit Reskrim POLDA DIY, Beliau menyatakan proses penyelesaian perkaranya dapat dilakukan dengan cara :¹⁶

- a. Pihak tersangka biasanya menginisiasi/ memulai mengusulkan upaya duduk bersama secara langsung maupun melalui pengacaranya untuk disampaikan kepada penyidik dan penyidik menyampaikan kepada pihak pelapor.
- b. Upaya duduk bersama tersebut dilakukan di luar kantor polisi dan tanpa kehadiran penyidik. Biasanya dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara dan didampingi pengacara masing-masing. Setelah tercapai titik temu dan sepakat, para pihak tersebut di atas menuangkan hasil kesepakatan bersama dalam sehelai kertas bermeterai dan ditandatangani oleh para pihak terkait.
- c. Kemudian bersama dengan melampirkan lembar kesepakatan bersama yang telah ditandatangani oleh para pihak tersebut, pelapor membuat surat permohonan pencabutan laporan polisi kepada Direktur Reskrim atau kasat Reskrim. Kemudian penyidik menyampaikan surat permohonan tersebut dan melampirkan hasil kesepakatan bersama tersebut kepada pimpinan untuk

¹⁶Wawancara dilakukan kepada Khatarina Ekorini Indriati, S.S selaku Kanit A (PPA) Subid M, Dit Reskrim POLDA DIY pada tanggal 20 mei 2015.

meminta petunjuk. Setelah pimpinan mempertimbangkan, maka dapat dibuat Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3);

Dalam proses perkara pidana anak yang ancaman pidananya diatas 7 (tujuh) tahun yang dalam sistem peradilan pidana anak tidak dapat diwujudkan dengan restoratif, namun ada keinginan dari kedua belah pihak yaitu pihak korban dan pihak pelaku untuk berdamai maka hal itu dapat dilakukan dengan kesepakatan bersama.

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga model yang paling sering digunakan, menurut peneliti *Familly Group Conferencing* yang paling sesuai untuk diterapkan karena, penyelesaian tidak hanya melibatkan pelaku dan korban melainkan keluarga korban. Selain itu Model *Familly Group Conferencing* ini dipilih karena sesuai dengan budaya dalam masyarakat yang mendahulukan proses perdamaian secara kekeluargaan, dengan sama-sama membicarakan permasalahan yang terjadi, dan budaya kekeluargaan ini telah lahir dalam lingkungan adat masyarakat Indonesia.

VII. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab – bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum/skripsi ini, yaitu :

1. Apakah penyelesaian perkara pidana anak sudah dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif: Dalam perkara pidana anak penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu langkah awal dalam proses penyelesaiannya sebelum melanjutkan ke proses berikutnya. Dengan

kata lain bahwa keadilan restoratif ini sudah dilakukan dalam penyelesaian perkara pidana pada anak, dalam proses penyelesaian dengan metode ini, yang berhasil damai akan dicabut laporannya oleh pihak terlapor karena telah adanya kesepakatan bersama dalam perdamaian yang dilakukan. Proses penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif ini tidak semuanya dapat berjalan dengan lancar, sering dijumpai beberapa kendala antara lain :

- 1) Dalam kasus-kasus yang ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun dan tidak bisa menggunakan upaya diversi.
 - 2) Pihak terlapor yang ingin berdamai, namun pihak korban ingin kasus tetap diproses sampai tuntas.
 - 3) Sering terjadinya *re-offerending* atau pelanggaran kembali oleh pelaku yang telah menjalani *restorative justice*.
2. Model yang sesuai untuk diterapkan guna penyelesaian perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif adalah : Model *Familly Group Conferencing* ini dipilih karena sesuai dengan budaya dalam masyarakat yang mendahulukan proses perdamaian secara kekeluargaan, dengan sama-sama membicarakan permasalahan yang terjadi, dan budaya kekeluargaan ini telah lahir dalam lingkungan adat masyarakat Indonesia. Model *Familly Group Conferencing* ini melibatkan korban, dan anggota keluarga dari masing-masing pihak. Model *Familly Group Conferencing* ini dilakukan dengan pendekatan antara keluarga untuk saling terbuka sehingga mampu menemukan jalan keluar yang terbaik untuk korban dan pelaku. Pendekatan dengan model *Familly Group Conferencing* memberikan pertimbangan kepada pihak korban

untuk dapat mempertimbangkan usia dari pelaku yang masih di bawah umur serta perbuatan yang dilakukannya masih bisa dimaafkan dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

VIII. Daftar Pustaka

Buku :

Gultom Maidin, 2013. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, refika aditama, Bandung.

Marlina, 2009. *Peradilan Anak di Indonesia. Pengembangan Konsep Diservasi dan Restorative Justice*, refika aditama, Bandung.

Nashrian, 2011. *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*, raja grafindo persaja, Jakarta.

Soetedjo Wagiaty dan Melani, 2013. *Hukum Pidana Anak*, refika aditama, Bandung

Widiartana G, 2010. *Keadilan Restoratif dalam Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana*, UAJY, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Website

Hade Brata, *Restorative Justice Sebagai alaternatife Penyelesaian Perkara Pidana Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Diakses dari <http://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/viewFile/5506/2334> (diakses tanggal 8 Mei 2015).

